BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pertumbuhan Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak terhadap penerimaan pajak di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Bruto Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan Produk Domestik Bruto di Indonesia paling tinggi terjadi pada tahun 2006. Hal ini didukung oleh seluruh sektor ekonomi, mulai dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perkebunan hingga sektor jasa-jasa yang mengalami pertumbuhan positif. Namun, dalam pertumbuhannya tidak semua sektor mengalami pertumbuhan yang signifikan, selain itu kontribusi setiap sektor terhadap PDB sangat fluktuatif setiap tahunnya bahkan pada tahun 2009 mengalami penurunan seperti sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan.
2. Jumlah Wajib Pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2002 hingga tahun 2009, namun bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, jumlah Wajib Pajak di Indonesia pada tahun 2009 hanya sekitar 5% dari total penduduk Indonesia. Bila dilihat dari perkembangannya, jumlah Wajib Pajak di Indonesia rata-rata mengalami peningkatan sebanyak

1.162.460 WP setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,58% setiap tahunnya. Hal ini terutama didukung oleh peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, hingga tahun 2009 kontribusi terbesar penerimaan PPh masih didominasi oleh Wajib Pajak Badan.

3. Jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2002 - 2009. Penambahan jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia hingga tahun 2006 tidak begitu banyak, namun pada tahun 2007 dan tahun 2008 penambahan jumlah Kantor Pelayanan Pajak mengalami peningkatan yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan KPP Madya dan KPP Pratama diberbagai wilayah Indonesia sejalan dengan modernisasi perpajakan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia maka jumlah Kantor Pelayanan Pajak ini belum dikatakan ideal, karena 1 KPP harus melayani sekitar 716.867 penduduk Indonesia, atau rasio antara jumlah pegawai pajak dengan penduduk Indonesia adalah 1 : 7.500.
4. Penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2002 hingga tahun 2009. Namun, realisasi penerimaan pajak ini terkadang tidak mencapai target yang telah ditentukan dalam APBN. Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto yang dihasilkan, maka penerimaan pajak ini belum optimal karena tax ratio rata-rata hanya mencapai 13,7%. Hal ini sangat ketinggalan dengan beberapa negara asia lainnya.
5. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak, dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di

Indonesia dengan arah hubungan positif. Artinya semakin besar Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak, dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak akan meningkatkan penerimaan pajak. Sebaliknya, semakin kecil Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak, dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak akan menurunkan penerimaan pajak. Sebesar 99,6% perubahan pada penerimaan pajak bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak, dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak, dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak telah terbukti membawa pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto di Indonesia harus memperhatikan pertumbuhan setiap sektor, khusunya sektor-sektor yang bisa menyerap tenaga kerja. Salah satu sektor yang vital adalah sektor industri pengolahan dimana sektor ini merupakan sektor dengan penyerap tenaga kerja terbanyak. Hal yang bisa dilakukan dalam memperbaiki sektor ini adalah dengan memperbaiki permodalan, dimana bank memberikan kemudahan syarat pengajuan kredit atau pemberian dana langsung dari pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), selain itu dukungan masyarakat untuk mencintai

produk dalam negeri sangat membantu agar perusahaan tetap beroperasi dan perekonomian tetap stabil.

2. Jumlah Wajib Pajak di Indonesia telah ,mengalami pertumbuhan yang cukup besar hingga tahun 2009, namun masih sekitar 5% dari total penduduk Indonesia, hal ini mengindikasikan bahwa jumlah Wajib Pajak masih bisa ditingkatkan. Oleh karena itu pemerintah harus terus berupaya mengadakan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, seperti halnya *sunset policy* pada tahun 2008 yang telah meningkatkan sekitar 3 juta wajib pajak.
3. Jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat besar sejalan dengan modernisasi perpajakan. Namun jumlah ini belum ideal apabila dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang mencapai 238 juta jiwa. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya menambah jumlah KPP termasuk jumlah pegawai pajak agar perbandingannya menjadi ideal. Penambahan tersebut perlu dilakukan diberbagai wilayah secara merata sesuai dengan kebutuhannya.
4. Penerimaan pajak di Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya, namun jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto *tax ratio* yang dihasilkan sangat kecil sehingga penerimaan pajak masih bisa dioptimalkan. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya memperhatikan potensi-potensi yang dapat meningkatkan penerimaan pajak lebih optimal.

5. Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak, serta jumlah Kantor Pelayanan Pajak sebaiknya lebih diperhatikan lagi, karena faktor-faktor ini memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia dan berdampak pada perekonomian nasional. Contohnya rendahnya tax ratio Indonesia menjadi salah satu indikator pada perekonomian sekaligus penilaian terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.